

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi :


1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian daerah;
2. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang manajemen kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Penetapan tunjangan, kesejahteraan dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
7. Pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian; dan
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas penataan pegawai	a. <b>Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja</b>	<p><b>Makna :</b> Formasi kebutuhan pegawai adalah jumlah dan susunan pegawai yang didasarkan pada analisa jabatan (anjab) dan penghitungan analisis beban kerja (ABK) yang disesuaikan dengan tupoksi masing masing unit/kantor/badan</p> <p><b>Alasan :</b> Organisasi dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh jumlah pegawai yang sesuai dengan beban kerja yang diampunya</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibanding Jumlah formasi berdasar analisa beban kerja</p>	Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Informasi.	Buku Analisa Beban Kerja dan Database Jumlah Pegawai dalam Aplikasi SIMPEG.
		b. <b>Persentase peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan</b>	<p><b>Makna :</b> Salah satu indikator dalam menilai kompetensi pegawai adalah dengan melihat tingkat pendidikan formal yang dimilikinya</p> <p><b>Alasan :</b> Pendidikan dan pelatihan pegawai memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai harus diberikan secara berkala untuk memelihara kompetensi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Perbandingan jumlah pegawai yang tingkat pendidikannya meningkat dengan jumlah seluruh pegawai</p>	Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Informasi.	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Sub Bidang Formasi dan Pengadaan.

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
		<p><b>c. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi berdasarkan hasil <i>assesment</i></b></p> <p><b>d. Persentase Pejabat Administrator yang memenuhi syarat jabatan</b></p> <p><b>e. Persentase pejabat Fungsional Tertentu yang telah memenuhi syarat Jabatan</b></p>	<p><b>Makna :</b> Penyelesaian tugas dan fungsi jabatan membutuhkan pegawai yang memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan syarat jabatan</p> <p><b>Alasan :</b> Salah satu faktor keberhasilan dalam pelaksanaan tugas adalah menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah pejabat pimpinan tinggi berdasarkan <i>assesment</i> dengan Jumlah pejabat pimpinan tinggi</li> <li>• Jumlah pejabat administrator yang memenuhi syarat pendidikan dan penjurusan dibanding jumlah pejabat administrator</li> <li>• Jumlah pejabat fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat jabatan dibagi jumlah pejabat fungsional tertentu</li> </ul>	Bidang Mutasi dan Promosi	Sub Bidang Administrasi dan JPT, Sub Bidang Jabatan Fungsional.
2.	Meningkatnya disiplin pegawai	<b>Persentase Pegawai ASN yang disiplin</b>	<p><b>Makna :</b> Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai disiplin sebagai ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dsb). Sehingga disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan.</p> <p><b>Alasan :</b> Disiplin dapat mendorong dan merupakan sarana penting untuk mencapai produktivitas.</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Jumlah pegawai yang disiplin dibagi jumlah pegawai</p>	Bidang Kedudukan Hukum, Kesejahteraan dan Pemberhentian.	Sub Bidang Hukum, Disiplin dan Penilaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggungjawab	Sumber Data
3.	Meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen kepegawaian	<b>Persentase data kepegawaian yang akurat dan terkini</b>	<p><b>Makna :</b> Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (<i>e-government</i>) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p><b>Alasan :</b> Informasi yang relevan, akurat, lengkap dan cepat adalah bahan bagi pengambilan keputusan yang tepat.</p> <p><b>Cara Perhitungan :</b> Jumlah data perorangan pegawai yang sudah dimutakhirkan dibagi jumlah seluruh pegawai</p>	Bidang Pengadaan, Pengembangan dan Informasi.	Sub Bidang Data dan Informasi

Banjarbaru, September 2017  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. PERKASA ALAM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590615 198602 1 008

### INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

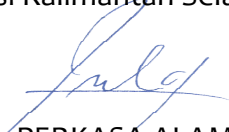
Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Cara Menghitung Indikator Kinerja	Sumber Data
1.	Peningkatan kualitas penerimaan ASN	Persentase CPNS dan PPPK yang lulus sesuai dengan formasi	Jumlah CPNS yang dinyatakan lulus dibanding jumlah formasi yang disetujui	Keputusan Kemenpan tentang kelulusan CPNS
2.	Peningkatan kualitas pegawai berdasarkan pendidikan formal dan pendidikan keterampilan/teknis	Persentase pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan tepat waktu	Jumlah pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan dibagi jumlah pegawai yang sudah harus menyelesaikan pendidikan sesuai batas waktu yang diberikan	Rekapitulasi surat pengembalian tubel
		Jumlah peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan pendidikan formal	Jumlah PNS yang secara kepegawaian status pendidikannya disesuaikan dengan ijazah pendidikan yang dimiliki PNS	Rekapitulasi daftar PNS yang melakukan pencantuman gelar, lulus tugas belajar, PNS lulus UKPPI
		Persentase pegawai yang lulus pendidikan teknis	Jumlah PNS yang lulus pendidikan teknis dibagi Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan teknis	Laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan teknis
3.	Peningkatan pengelolaan pejabat pimpinan tinggi, administrasi dan Pejabat Fungsional Tertentu	Persentase pejabat pimpinan tinggi yang terisi	Jumlah pejabat pimpinan tinggi dibagi jumlah formasi jabatan pimpinan tinggi dikali 100%	Laporan pengelolaan data pejabat pimpinan tinggi
		Persentase pejabat administrator yang terisi	Jumlah pejabat administrator dibagi jumlah formasi jabatan administrator dikali 100%	Laporan pengelolaan data pejabat administrator
		Persentase pejabat fungsional tertentu yang terisi	Jumlah pejabat fungsional tertentu yang ada dibagi jumlah formasi jabatan fungsional dikali 100%	Laporan pengelolaan data pejabat fungsional tertentu
4.	Peningkatan distribusi pegawai	Persentase penempatan pegawai sesuai formasi	Kesesuaian SK penempatan pegawai dengan latar belakang pendidikan	Rekapitulasi SK Penempatan pegawai
5.	Meningkatnya disiplin PNS	Persentase pegawai yang bebas hukuman disiplin	Jumlah pegawai bebas hukuman disiplin dibagi jumlah seluruh pegawai di kali 100%	Laporan rapat majelis pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin
6.	Peningkatan sistem informasi manajemen kepegawaian	Persentase pegawai dengan data terkini	Jumlah data perorangan pegawai yang sudah dimutakhirkan dibagi jumlah pegawai di kali 100%	Data profil kepegawaian
7.	Pengelolaan tata naskah dinas perorangan pegawai	Persentase tata naskah perorangan pegawai yang telah diakurasi	Jumlah tata naskah dinas perorangan pegawai yang sudah dimutakhirkan dibagi jumlah pegawai dikali 100%	Laporan triwulan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Cara Menghitung Indikator Kinerja	Sumber Data
8	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP BKD	Nilai atas pelaksanaan SAKIP BKD yang dilakukan oleh tim evaluator	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
9.	Pelayanan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase aset yang tercatat	Jumlah aset yang tercatat dalam catatan aset dibagi Jumlah aset yang ada dikali 100 %	Buku Catatan Aset BKD
		Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS BKD	Jumlah urusan administrasi kepegawaian yang ditangani dibagi dengan jumlah administrasi kepegawaian yang ada dikali 100 %	Dokumen rekapitulasi pelayanan administrasi kepegawaian
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan BKD	Sarana prasarana yang diperlukan BKD dibagi dengan sarana dan prasarana yang tersedia dikali 100 %	Dokumen rekapitulasi pemenuhan sarana dan pra sarana BKD
10	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase penyerapan anggaran SOPD BKD	Serapan anggaran yang terrealisasi dibagi dengan Pagu anggaran yang tersedia dikali 100 %	Laporan Realisasi Keuangan BKD
11	Peningkatan kualitas SDM SOPD	Persentase peserta pelatihan /Bimtek yang paham	Jumlah PNS yang paham setelah mengikuti pelatihan dibagi dengan jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	Laporan penyertaan pelatihan

Banjarbaru,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan

  
Drs. PERKASA ALAM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590615 198602 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV**

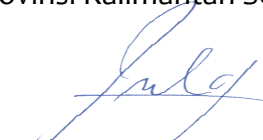
Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Rumus Penghitungan
1.	Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan dan pengembangan pegawai	Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai yang tersusun	
2.	Peningkatan kualitas seleksi CPNS	Persentase formasi seleksi CPNS yang ter isi	Jumlah peserta seleksi CPNS dibagi Jumlah Formasi yang ada dikali 100 %
		Persentase formasi Capra IPDN yang terisi	Jumlah Capara IPDN yang lulus Pantukhir dibagi Jumlah Formasi yang tersedia dikali 100 %
3.	Peningkatan kualitas pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal	Jumlah penyertaan pegawai pada pendidikan formal	Jumlah penyertaan pada tubel Jumlah Ijin Belajar yang diterbitkan
4.	Peningkatan keterampilan pegawai	Jumlah penyertaan pegawai pada diklat teknis/kursus	
5.	Pengelolaan data pejabat pimpinan tinggi	Jumlah peserta seleksi Jabatan Pimianan Tinggi yang lulus	
6.	Pengelolaan data pejabat administrasi	Jumlah pejabat administrasi dan pengawas yang mengikuti uji kompetensi	
7.	Peningkatan pengetahuan tentang jabatan fungsional	Jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi jabatan fungsional	
8.	Pengelolaan data pejabat fungsional tertentu	Jumlah PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional	
9.	Penempatan pegawai berdasarkan formasi	Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan tepat waktu	
10.	Peningkatan pengetahuan disiplin pegawai	Jumlah pegawai yang mendapat pengetahuan disiplin pegawai	
11.	Peningkatan penegakan disiplin pegawai	Jumlah penjatuhan hukuman disiplin yang diselesaikan	
12.	Peningkatan pelaporan kinerja	Persentase PNS yang melaksanakan SKP On Lline	Jumlah PNS yang melaksanakan SKP On Line dibagi dengan JUmlah PNS dikali 100 %
12.	Pemberian penghargaan terhadap pegawai	Jumlah penghargaan tingkat nasional yang diserahkan	
13.	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dimutakhirkan	
		Jumlah jenis buku infomasi kepegawaian yang disusun	
14.	Peningkatan konektivitas database kepegawaian perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dengan database kepegawaian	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi dengan database kepegawaian dibagi dengan jumlah perangkat daerah yang ada dikali 100 %
15.	Peningkatan Penataan arsip kepegawaian	Persentase tata naskah perorangan pegawai yang telah diakurasi	Jumlah tata naskah perorangan pegawai yang telah diakurasi dibagi jumlah pegawai dikali 100 %

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Rumus Penghitungan
16.	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja SOPD	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SOPD	
		Nilai komponen perencanaan pada LKIP SOPD	
		Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	
17.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian SOPD	Jumlah Pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	
18.	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah aset yang tercatat	
		Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	
		Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	
19.	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan SOPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	
20.	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah peserta pelatihan/bimtek yang paham	

Banjarbaru,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan



Drs. PERKASA ALAM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590615 198602 1 008